

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 23 Desember 2014

Subyek : Hutan

Hal : 12

TATA KELOLA BURUK, HUTAN JAMBI KRITIS

Kawasan hutan di Jambi menyusut ke titik kritis seluas 934.000 hektar atau 40 persen dari total luas hutan. Pemerintah membutuhkan biaya paling tidak Rp 15,8 triliun untuk memulihkan kembali hutan yang rusak dan menunggu 128 tahun untuk seluruh proses rehabilitasinya.

Hal itu dikemukakan Nurina Widagdo, Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam Peluncuran Buku Laporan Indeks Tata Kelola Hutan, Senin (22/12), di Jambi.

Menurut Nurina, besarnya biaya pemulihan itu belum termasuk biaya konflik di sektor kehutanan yang kerap terjadi di Jambi. Tidak maksimalnya pendapatan pajak dan nonpajak dari sektor kehutanan juga belum dihitung sebagai kerugian negara.

Selain kondisi kritis, penurunan kualitas hutan dari primer menjadi sekunder terjadi pada 883.000 hektar. Dengan demikian, total hutan rusak di Jambi sudah mencapai 86 persen dari total luas hutan 2,2 juta hektar.

Luasnya hutan rusak tersebut sejalan dengan rendahnya kemampuan tata kelola hutan oleh pemerintah daerah. Hasil kajian UNDP dengan melibatkan para pihak menunjukkan, indeks tata kelola hutan tingkat kabupaten di Jambi rata-rata 33,37 pada skala 1-100. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan indeks tata kelola hutan dua tahun lalu yang mencapai 33,80.

Rendahnya indeks itu terkait dengan lemahnya kepastian hukum di kawasan hutan, keadilan atas sumber daya hutan, transparansi pengelolaan hutan, dan kapasitas penegakan hukum.

Adapun indeks tertinggi diperoleh Kabupaten Merangin dengan nilai 39,87, diikuti Kabupaten Batanghari 38,23, dan Kabupaten Kerinci 38,04. Kerinci dinilai positif melakukan terobosan dalam pengakuan hutan adat pada revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten. Sembilan lokasi hutan adat telah diakui Pemerintah Kabupaten Kerinci dan tiga lokasi hutan adat lain dalam proses pengakuan.

Kabupaten Merangin paling banyak mengakui hutan desa, yaitu 17 hutan desa. Sementara Kabupaten Batanghari melakukan terobosan berupa penyelesaian konflik dengan melibatkan lembaga adat.

Nurina mengatakan, pemerintah mendapat tantangan berat menjaga hutan yang tersisa. Penetapan kawasan hutan di Jambi belum sepenuhnya menjawab isu klaim pihak ketiga dalam kawasan hutan dan tingginya kegiatan ilegal di kawasan hutan.

Pemenuhan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum memadai. Rasionya, 93,38 persen kawasan hutan dimanfaatkan pelaku usaha dan 6,62 persen dimanfaatkan masyarakat secara legal. Ini membuktikan terjadi ketimpangan akses pengelolaan hutan. Penegakan hukum juga baru dilakukan kepada pelaku individu, belum menyentuh pelaku korporasi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah mengatakan, kajian ini menjadi masukan daerah untuk membenahi tata kelola hutan. Pihaknya akan memberi peluang lebih besar kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Pihaknya juga berbenah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola hutan. (ITA).